

Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri

Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: sz123@ums.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui peran ganda perempuan di era industri, tulisan ini menggunakan metode deskriptif normative, temuan dari pembahasan ini adalah pada dasarnya perempuan memiliki peran utama sebagai seorang yang bekerja di ranah domestic, tetapi seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran dari yang awalnya domestic bergeser kearah public, beberapa alasan yang menjadikan perempuan untuk bekerja di sector public berkaitan dengan nilai ekonomis (perekonomian) dalam keluarga, serta untuk memanfaatkan fungsi nya sebagai manusia yang seutuhnya tanpa ada diskriminasi bagi perempuan

A. PENDAHULUAN

Didalam kehidupan social kemasyarakatan pria dan wanita memiliki peran gender berlainan. Dalam komunitas kemasyarakatan, perbedaan pekerjaan yang dimiliki oleh keduanya merupakan suatu keniscayaan, peran serta antara pria dan wanita dalam mengatur rumah tangga juga berbeda. Dinamika perkembangan peran gender didalam masyarakat dilator belakangi oleh beberapa factor antara lain: lingkungan social masyarakat, struktur social bahkan hingga cerita dan mitos-mitos di masa lalu untuk menjelaskan perbedaan gender tersebut.

Peran serta perempuan didalam kehidupan sangatlah kompleks, kecenderungan yang muncul didalam masyarakat selama ini, perempuan memiliki tugas dalam fungsi reproduksi, melahirkan serta mengasuh anak. Di samping itu pada beberapa kondisi perempuan dapat memiliki fungsi kerja berupa ekonomi produktif yang berguna untuk menopang perekonomian keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Moser dalam Julia Cleves Mosse (2004: 37) bahwasanya terdapat tiga serangkai peran perempuan yang meliputi peran dalam reproduksi, ekonomi produktif, dan manajemen komunitas. Hal ini menunjukkan, pada dasarnya perempuan memiliki peran ganda di samping harus melakukan pekerjaan rumah tangga atau domestik, juga memiliki peran pencari nafkah untuk meraih kesejahteraan

Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas harus ditunjang dengan Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan karena hal tersebut merupakan factor yang sangat penting. Pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai hal, memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus

memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, serta hak-hak anak yang tidak terabaikan.

Peran perempuan di bidang ekonomi sudah menunjukkan adanya perbaikan, walaupun bila dibandingkan dengan laki-laki masih lebih rendah. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan mengalami sedikit peningkatan dari 48,6 persen (Sakernas, Februari 2006) menjadi 49,5 persen (Sakernas, Februari 2007) dan 51,3 persen (Sakernas, Februari 2008), sedangkan lakilaki 84,7 persen pada tahun 2006, 83,7 persen pada tahun 2007 serta 83,6 persen pada tahun 2008. Menurut data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Agustus 2007, sekitar 79 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di luar negeri adalah perempuan. Sepuluh tahun kemudian TPAK laki-laki pada Februari 2017 sebesar 83,05 persen,. Sedangkan TPAK perempuan hanya 55,04 persen pada februari 2017.

Terlihat dari data statistic tersebut bahwasanya TPAK perempuan mengalami kenaikan dalam kurun waktu sepuluh tahun sebesar 4 persen

Sebagian besar pekerja di sektor informal adalah juga perempuan. Pekerja-pekerja tersebut umumnya tidak memiliki perlindungan sosial sehingga menjadi sangat rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan bahkan diperdagangkan. Upah pekerja perempuan rata-rata masih 30 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja laki-laki. Kondisi pekerja perempuan di sektor pertanian lebih memprihatinkan, seringkali tidak memperoleh upah karena dianggap sebagai pekerja keluarga. Akses perempuan terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan peluang pasar juga masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.

Data statistik ini dipakai untuk menunjukkan bahwa ada kesenjangan struktural antara laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini kaum perempuan selalu berada dalam kondisi keterpurukan. Data statistik memang dapat memberikan sebuah visualisasi tentang keadaan perempuan sehingga dengan mudah dapat disimpulkan, kaum perempuan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, dengan hanya mengandalkan data statistik semata-mata, tanpa mengkaji konteks di balik data statistik tersebut, informasi yang berharga untuk menganalisis kondisi perempuan akan hilang. Bila informasi yang demikian ini terlewatkan, maka hal itu justru dapat menghambat usaha untuk menciptakan keadilan gender itu sendiri.

Meskipun demikian masih adanya pengekan terhadap perempuan menjadikan kaum perempuan tidak dianggap setara dengan kaum laki-laki. Dengan keterbatasan keluar dan bekerja dapat diartikan bahwa kaum perempuan tidak diberi kesempatan sama untuk mengembangkan kemampuan sebagaimana kaum laki-laki. Kenyataan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan.

Oleh karena itu dapat dirumuskan pertanyaan yaitu, bagaimana peran perempuan dalam keluarga dan dalam masyarakat industri.

B. PEMBAHASAN

a. Peran Ganda Perempuan

Pada dasarnya peran ganda perempuan mempunyai arti dua atau lebih peran atau fungsi yang harus dikerjakan oleh seorang perempuan dalam tempo atau waktu yang bersamaan. Peran-peran ini pada umumnya berkaitan dengan peran perempuan dalam ranah domestik, sebagai ibu rumah tangga, serta peran perempuan dalam ranah publik yang biasanya berupa peran wanita dalam wilayah pekerjaan (tenaga kerja) (Rustiani, 1996:60). Dengan konsep peran ganda seperti ini, perempuan tidak lagi berkat di sektor domestik, tetapi juga dapat merambah sektor publik.

Adanya Pergeseran peran atau fungsi diantara pria dan wanita dalam ranah kehidupan keluarga atau berumah tangga, mencerminkan pula pergeseran fungsi wanita dalam ranah reproduksi. Dari perkembangan dalam organisasi ekonomi tradisional, bahwa ada dua tipe peranan sebagaimana Sajogyo dalam Dyah Ismoyowati (2002:26) yaitu:

1. peranan yang digambarkan fungsi perempuan keseluruhan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan rumah tangga maupun pemeliharaan atas kebutuhan hidup bagi anggota keluarga serta rumah tangganya.
2. peranan perempuan yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dalam ranah berumah tangga serta kegiatan mencari nafkah. Bobot yang berkaitan dengan bidang nafkah ini terdapat perbedaan didalam masyarakat

Pertumbuhan laju ekonomi yang semakin meningkat serta kemajuan globalisasi lapangan kerja semakin rumit. Implikasi lain dari adanya kemajuan ini, tercermin dari

membaihnya status serta mulai banyaknya lowongan pekerjaan untuk perempuan. Akan tetapi Walaupun tingkat partisipasi angkatan kerja (PAK) perempuan bertambah, namun masih banyak wanita yang bekerja paruh waktu (*part time*) atau bekerja di sektor informal. Dikarenakan perempuan berperan sebagai ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga termasuk didalamnya mengasuh anak disatu sisi dan sebagai perempuan pekerja di sisi yang lain.

Keikutsertaan perempuan di masa milenial kedalam ranah publik bukan hanya untuk mewujudkan persamaan hak, akan tetapi turut serta menyatakan fungsi dan peran yang signifikan bagi pembangunan serta pembentukan masyarakat.

Keikutsertaan perempuan tersebut menyangkut peran tradisi yang berkaitan dengan ranah domestik seorang perempuan meliputi peran sebagai isteri, ibu, serta pengelola dan wakil suami dalam berumah tangga, adapun peran transisi berkaitan dengan ranah publik, dalam artian perempuan sebagai pekerja, anggota social masyarakat, dan juga pembangunan masyarakat. Dalam peran ini pula tercermin perempuan sebagai pekerja turut serta dalam kegiatan pencarian nafkah di belbagai aspek lapangan pekerjaan yang tersedia, sesuai dengan keterampilan, minat serta Pendidikan yang dimiliki. (Sukes, 1991).

Terdapat beberapa akibat dari keikutsertaan perempuan dalam bekerja, diantaranya adalah ikatan keluarga menjadi renggang, kenakalan remaja yang semakin meningkat serta beberapa akibat lain.

Diskriminasi gender muncul akibat dari pada persepsi dan keyakinan bahwa sanya perempuan dilahirkan dengan sifat dan karakter yang berbeda dengan laki-laki sehingga hal tersebut dapat memunculkan ketidakadilan gender bagi perempuan tersebut, contoh misalkan : keyakinan seseorang akan wanita berhati lembut dan bersifat emosional, maka dalam bekerja tidak dapat menjadi atau menjabat jabatan yang bersifat manajerial. Contoh yang lain, diskriminasi yang muncul akan memunculkan pandangan bahwa perempuan ada untuk melakukan pekerjaan yang lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan rendah dan hasil jerih payah yang rendah pula. Wilayah kerja perempuan pada dasarnya terbatas dalam wilayah rumah tangga (sektor domestik), walaupun pada masa sekarang perempuan mulai masuk kedalam pekerjaan di sektor publik, jenis pekerjaan ini pun merupakan perpanjangan dari pekerjaan lainnya yang lebih banyak memerlukan keahlian manual. Di negara-negara berkembang, tingkat pendidikan yang sangat rendah dengan ketrampilan rendah pula, memaksa perempuan memasuki sektor informal yang sangat eksploitatif dengan gaji sangat rendah, jam kerja yang tak menentu dan panjang, tidak ada cuti dengan bayaran penuh serta keuntungan-keuntungan lainnya maupun jenis pekerjaan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Memperhatikan peranan perempuan dalam pembangunan, sejak sensus 1971 sudah mulai dirasakan kesenjangan partisipasi dalam pembangunan antara pria dan wanita. Kaum perempuan mengalami diskriminasi tidak saja di sektor domestik, di sektor publik kaum perempuan mengalami hal yang sama. Sistem ekonomi industri yang kapitalik yang mengutamakan

pertumbuhan dan konsumsi justru menimbulkan diskriminasi terhadap wanita. Diskriminasi di bidang ekonomi dapat dilihat dari kesenjangan upah yang diterima perempuan dibanding pria. Kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan perempuan semakin besar kesenjangan upah yang diterima terhadap pria.

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan ini akan berdampak pada kedudukan mereka dalam pekerjaan dan upah yang mereka terima (Siti Hidayati dalam Ihromi, 1995). Hal serupa juga terjadi pada jenis usaha, artinya perempuan yang melakukan usaha ekonomi yang sama dengan pria mendapatkan penghasilan yang lebih rendah.

Ketertinggalan perempuan pada peran transisi mereka adalah apabila ditelusuri lebih lanjut yang kelihatannya berpangkal pada pembagian pekerjaan secara seksual di dalam masyarakat dimana peran perempuan yang utama adalah lingkungan rumah tangga (*domestic sphere*) dan peran pria yang utama di luar rumah (*public sphere*) sebagai pencari nafkah utama. Pembagian kerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi perempuan, sebab pembagian kerja seperti ini selain mengurung perempuan, juga menempatkan perempuan pada kedudukan subordinat terhadap laki-laki, sehingga cita-cita untuk mewujudkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat akan sulit terlaksana.

Menurut Rogers B dalam Mauuren (1981), adanya pembagian kerja secara seksual ini tentu saja tidak hanya terbatas pada bidang kerja upahan saja. Dalam kerja-kerja tanpa upah, baik dalam pertanian, dalam perdagangan atau industri kecil (yang lebih banyak melibatkan keluarga sendiri), atau dalam tugas-tugas 'rumah tangga' seperti menyiapkan makanan untuk keluarga dan mengasuh anak, pembagian kerja secara seksual juga merupakan fakta yang selalu ada, dan secara tetap pula semakin merugikan perempuan. Dalam kegiatan-kegiatan yang berkisar pada kerja-kerja rumah tangga—baik dalam pertanian maupun non-pertanian—perempuan bekerja sebagai buruh tanpa upah, dengan bagian keuntungan yang seringkali sangat kecil. Di daerah-daerah pertanian yang miskin, berkembangnya tanaman komoditi dan metode-metode baru penanaman, serta berpindahnya tempat mengolah makanan ke luar rumah, telah membawa perubahan pada pembagian kerja secara seksual, menciptakan kegiatan yang secara finansial menguntungkan laki-laki, dan menyisihkan perempuan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kurang produktif. Dan terakhir, di kebanyakan masyarakat, pembagian kerja berdasarkan gender sangat jelas terlihat dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah saya sebutkan di atas sebagai pekerjaan 'rumah tangga'. Dalam masyarakat di mana perempuan mengerjakan semua tugas rumah tangga, pekerjaan ini sudah pasti akan dinilai rendah serta sangat membatasi kemampuan perempuan untuk ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang. Di banyak tempat di dunia ini, pembagian kerja secara seksual di dalam rumah memaksa perempuan untuk bekerja dengan waktu yang lebih panjang daripada waktu kerja laki-laki, dan setelah seharian bekerja memperoleh standar hidup yang lebih rendah.

Masyarakat yang mengalami tingkat evolusi lebih maju, pembagian kerja secara seksual tetap berlanjut, meskipun dalam bentuk, kuantitas dan kualitas yang berbeda. Dalam masyarakat agraris misalnya, urusan-urusan ekonomi dan politik secara ketat teroganisir di bawah kaum laki-laki. Kaum perempuan disisihkan ke sektor domestik, menyangkut urusan kerumahtanggaan. Dalam masyarakat industri, pola pembagian kerja tidak berbeda dengan masyarakat agraris. Status pekerjaan lebih tinggi dan kekuasaan politik masih didominasi oleh kaum laki-laki dan di sektor pekerjaan berstatus lebih rendah (kurang produktif) didominasi oleh perempuan dan akses untuk mendapatkan pengaruh politik bagi kaum perempuan tetap terbatas.

b. Peran Perempuan : Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga (*housewife*) sering digunakan untuk menunjukkan kepada para perempuan yang bekerja dalam ranah domestik, yang hanya mengurus keluarga. Menurut Julia Cleves (2004: 43) istilah tersebut adalah sesuatu yang dapat dikatakan baru. Boleh dikatakan, istilah ini baru muncul satu setengah abad yang lalu. Sejak itu, istilah ibu rumah tangga tersebar luas ke segenap penjuru dunia. Konsep ini mulai diperhitungkan ketika proses industrialisasi memungkinkan laki-laki, mengikuti pola kelompok kaya aristokrat dan memiliki seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja tapi bisa mewakili status dan kekayaan suaminya.

Nawal (2003:208) menjelaskan, menurut UU ketenagakerjaan, wanita yang bekerja dalam ranah domestik (rumah) atau biasanya disebut dengan ibu rumah tangga. tugas perempuan di dalam rumah tangga tidak terlihat oleh orang lain sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang produktif didalam masyarakat. Pada dasarnya wanita tersebut tidak dapat disebut dengan wanita karir, padahal pekerjaan wanita di dalam rumah merupakan pekerjaan produktif bagi keluarganya. Akan tetapi, pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang menghasilkan upah sehingga tidak bernilai ekonomi. Padahal, jam kerja seorang ibu rumah tangga sepanjang waktu.

Deskripsi kerja perempuan dalam ranah rumah tangga mencakup segala bidang, mulai dari memasak, mencuci pakaian, merawat, mendidik dan mengasuh anak dan lain sebagainya yang pada dasarnya dalam pekerjaan tersebut dilakukan tanpa bayaran. Dan ditambahkan kurang adalah legitimasi dari masyarakat bahwa pekerjaannya tersebut termasuk pekerjaan produktif yang juga membantu dalam perekonomian.

setiap orang dapat menghasilkan sesuatu karena manusia dapat mengetahui, menemukan dan menggunakan alat yang dapat digunakan sebagai sarana produksi. menafikan produktivitas seorang perempuan yang bekerja didalam rumah secara tidak langsung dapat dikatakan sama halnya dengan menafikan usaha dan sifat-sifat kemanusiaan yang ada. Sama halnya mengabaikan nilai upah pekerjaannya serta membebaskan semua pekerjaan rumah kepadanya tanpa imbalan apa-apa, sama artinya dengan menghilangkan hak-hak dasar perekonomian, seperti juga halnya dengan mewajibkan pekerjaan rumah kepadanya dan tidak diperbolehkannya memilih pekerjaan. Yang seharusnya terjadi, manusialah

yang memilih pekerjaannya dan bukan pekerjaan itu yang mewajibkannya hanya karena terlahir sebagai perempuan.

Menurut Nawal (2003:209), terdapat fakta-fakta berkaitan dengan diskriminasi wanita yang bekerja dalam ranah rumah tangga yaitu:

1. Menjauhkannya dari kemampuan produktif sebagai manusia serta menganggap rendahnya pekerjaannya sebagai pekerjaan yang produktif
2. Menjauhkannya dari upah atau imbalan
3. Pembebanan semua pekerjaan rumah tangga kepada perempuan

Perlu kita sadari kesenjangan antara imbalan dengan beban pekerjaan seorang perempuan sering kali terjadi dikarenakan oleh system ekonomi yang di anut oleh suatu negara dan juga adat istiadat berkaitan dengan pandangan terhadap perempuan yang berkembang didalam suatu masyarakat.

Kondisi inilah yang menjadikan perempuan diposisikan kedua dalam bekerja, pekerjaan rumah-tangga yang dikerjakan oleh wanita dipandang bukan sebagai profesi, hal ini dikarenakan tidak memberikan nilai ekonomis, padahal kita ketahui bersama pekerjaan rumah tangga menuntut keahlian seseorang.

Pada dasarnya Islam mengarahkan wanita dalam manajemen keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga, mengurus anak baik mulai dari menyusui hingga tamyiz nya, dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah dibebankan kepada laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga (Thalib, 2007:183). Akan tetapi didalam islam tidak ada larangan untuk seorang perempuan melakukan pekerjaan yang bernilai ekonomis misalkan berjualan dipasar, ataupun melakukan jual beli untuk menopang kehidupannya.

Sehingga tidak bias dipungkiri banyak perempuan pada masa nabi atau pun sesudahnya yang mengurus keluarga dan memiliki pekerjaan di luar rumah. Sejarah telah menjelaskan bahwa perempuan Arab yang paling terkenal adalah Khadijah, Istri pertama Nabi Muhammad Saw. Khadijah sosok perempuan Arab yang memiliki kepribadian dan kemandirian baik dari segi ekonomi maupun dalam hal kemasyarakatan.

c. Keikutsertaan Perempuan di Dunia Kerja

Di era industrialisasi terkhusus era revolusi industri 4.0 saat ini, sektor industri merupakan penggerak dari pembangunan, sector tersebut pada dasarnya sangat membutuhkan tenaga kerja yang merupakan salah satu proses dalam proses produksi. sumbangsih perempuan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan partisipasinya dalam angkatan kerja. Sebagai indikator, keikutsertaan perempuan dalam bidang pembangunan ekonomi ditunjukkan dari laju peningkatan keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja antara tahun 1975-2017 lebih cepat dari peningkatan laju partisipasi pria.

Selain dari pada itu, terkadang muncul kesenjangan dalam peningkatan karier bagi perempuan. Masalah ini

muncul disebabkan karena beberapa kalangan masih melakukan bias gender kepada perempuan, terutama sikap bias gender dari masyarakat dan perusahaan. Dan pula masih banyak rintangan bagi perempuan dalam melakukan pekerjaan terkhusus berkaitan dengan fungsi reproduktif nya, terutama pada saat memenuhi kewajibannya untuk memberikan ASI eksklusif.

Menurut Sayogyo dalam Sudarta (2001) peran perempuan di bidang pertanian dimulai semenjak orang mengenal alam dan bercocok tanam. Semenjak itu pula mulai berkembang pembagian kerja yang nyata antara laki-laki dan perempuan pada beragam pekerjaan baik di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat luas. Terdapat kurang lebih 21,74 juta rumah tangga petani di Indonesia, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor pertanian dan perhutanan cenderung meningkat sampai 40,71%, ini berarti jumlah SDM perempuan yang bekerja hampir separoh SDM laki-laki. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir 40% perempuan tani berasal dari golongan rumah tangga tidak mampu. Oleh karena itu SDM perempuan harus diberdayakan. Untuk itu pelatihan dan penyuluhan IPTEK untuk pengembangan kualitas SDM pertanian harus dimulai untuk menghilangkan segala bentuk diskriminatif.

Keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan sering tidak diperhitungkan, besarnya upah yang diterima perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 50% sampai 80% upah yang diterima laki-laki. Selain itu banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan (Hastuti, 2005). Kerja konkret mereka begitu diremehkan di dalam dokumentasi statistik. Meskipun kaum perempuan tampil mayoritas dalam produksi pertanian, namun sumbangan besar mereka ini tetap dianggap sepi. Dijelaskan juga oleh Hastuti (2005) bahwa banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan. Hal ini karena pengakuan kontribusi kerja konkret mereka tidak pernah ada, kerja mereka dipandang sekedar sampingan atau merupakan bagian dari tenaga kerja keluarga yang tidak pernah diupah, alias buruh tanpa upah.

Pada umumnya misi/harapan yang ingin dicapai oleh rata-rata tenaga kerja perempuan di pedesaan adalah alasan ekonomi yaitu menambah pendapatan keluarga. Sedangkan Novari, dkk (1991) menyebutkan, perempuan bekerja tentu bukan semata-mata karena alasan faktor ekonomi keluarga yang sedemikian sulit, tetapi juga beberapa motivasi lain, seperti suami tidak bekerja/pendapatan kurang, ingin mencari uang sendiri, mengisi waktu luang, mencari pengalaman, ingin berperan serta dalam ekonomi keluarga, dan adanya keinginan mengaktualisasikan diri. Sebagai contoh, hasil penelitian yang dilakukan Handayani, dkk. (2002) pada industri kerajinan patung kayu di Desa Sebatu, Gianyar-Bali, tenaga kerja perempuan responden menyatakan bahwa, motivasi mereka bekerja adalah: (1) untuk

menambah penghasilan keluarga, (2) penghasilan suami tidak mencukupi, (3) suami menyerahkan sebagian kecil pendapatannya untuk keperluan sehari-hari, (4) mencari pengalaman, pengetahuan dan untuk pergaulan. Melihat alasan ekonomi (1 sampai 3) yang dikemukakan responden yang sudah menikah menunjukkan adanya tanggung jawab seorang istri dalam rumah tangga, walaupun pendapatan mereka sering dipandang sebagai pendapatan tambahan.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam industri pada dasarnya sudah dapat diperkirakan, karena perempuan sudah banyak berperan dalam pasar kerja masyarakat desa dalam bidang pertanian ataupun social. Dua factor yang menjadi dasar Peningkatan jumlah partisipasi kerja perempuan yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan sisi permintaan (Tjiptoherijanto, 1997). *Pertama*, segi penawaran, sebab dari peningkatan tersebut dilihat dari segi ini terlihat dari semakin naiknya tingkat Pendidikan seorang perempuan serta turunnya angka kelahiran. Hal ini berjalas selaras dengan semakin diakuinya perempuan yang bekerja diluar rumah oleh masyarakat. Yang *Kedua*, factor permintaan, pada era saat ini industri-industri semakin tumbuh maka dengan bertumbuhnya industri tersebut semakin dibutuhkan pula tenaga kerja, terkhusus tenaga kerja perempuan, seperti contohnya industri tekstil dan garmen. adapun fenomena lain yang muncul dan mendorong masuknya perempuan ke lapangan kerja dikarenakan semakin tingginya biaya hidup dinegara ini apabila hanya ditopang oleh satu orang yang menjadi sumber pendapatan keluarga. Fenomena ini muncul ke permukaan dan terlihat jelas terutama pada keluarga yang berada di daerah perkotaan.

Kecenderungan seorang perempuan untuk bekerja diruang public pastinya akan mempunyai implikasi dan konsekuensi sosial, diantaranya: berkurangnya perhatian orang tua sehingga berakibat kepada kenakalan remaja/ anak muda; hubungan keluarga menjadi longgar bahkan terjadi keretakan rumah tangga.

Konsekuensi tersebut sering dianggap akibat dari semakin banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah, terutama di perkotaan. problematika akan menjadi semakin rumit, bilamana intensitas perempuan/ ibu rumah tangga bekerja disektor public berdurasi lama. Dengan kata lain perempuan tersebut harus tinggal di kota lain dan berpisah dengan keluarganya dalam kurun waktu lama, sehingga intensitas pertemuan keluarga menjadi berkurang berdampak pada hilangnya komunikasi yang berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga, bahkan dapat menyebabkan retaknya keluarga tersebut. Dalam sistem sosial budaya di Indonesia, peran dan tanggung jawab bagi kelancaran dan keselamatan rumah tangga ada di tangan wanita, sedangkan peran ayah atau bapak lebih dikaitkan sebagai penghasil dan penyangga pendapatan rumah tangga.

Kebiasaan suami sebagai seorang tulang punggung keluarga yang memberikan sebagian kecil dari upah yang didapatnya kepada isteri merupakan pendorong masuknya pekerja perempuan yang menikah ke pasar kerja. kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan ingin memanfaatkan potensi ekonomis yang mereka miliki, mengurangi ketergantungan pada suami berkaitan ekonomi, di samping adanya kesadaran bahwa perempuan

tidak ingin hanya melakukan peran tradisional yang berada di garis belakang tetapi juga mampu berperan pada sektor publik. Oleh karena itu, nilai kerja mereka yang selama ini diabaikan bahkan diremehkan harus dihargai dan dibuat tampak oleh tatanan masyarakat (Hamdani, 2005).

C. SIMPULAN

Pada dasarnya sifat kodrati seorang perempuan adalah bekerja dalam ranah domestic, tetapi hal tersebut tidaklah menutup kemungkinan adanya pergeseran peran perempuan didalam masyarakat, terkhusus berkaitan dengan peran yang memiliki nilai ekonomis, sehingga pada kondisi awal bekerja dalam ranah domestic menjadi ranah public.

Adanya pergeseran tersebut adalah dampak dari adanya partisipasi perempuan dalam peran ekonomis, sehingga menjadi masyarakat industri yang berbasis pada *money oriented*, partisipasi tersebut berakibat pada kondisi keluarga maupun hubungan social masyarakat, apabila mereka dapat mensikapi dan mengatasi permasalahan yang muncul dengan baik maka efek dari partisipasi kerja tersebut menjadi baik, begitu pun sebaliknya apabila mereka tidak dapat mensikapi dengan bijak maka akan rusak hubungan keluarga dan social masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Andayani, Trisni. Perubahan Peranan Wanita dalam Ekonomi Keluarga Nelayan di Desa Percut Kecamatan Percut sei Tuah Kabupaten Deli Serdang . Makalah ini disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII. Jakarta, 14-17 November 2006.
2. Sukes, Keppi, 1991. Status dan Peranan Perempuan: Apa Implikasinya Bagi Studi Perempuan, dalam Warta Studi Perempuan. Vol. 2 No I. Jakarta: PDII-LIPI
3. Cleves Mosse, Julia. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
4. Idriyani, Azazah. Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stress Kerja terhadap Kinerja Perawat Wanita Rumah Sakit (Studi Pada Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. Semarang: PPs Universitas Diponegoro Semarang. 2009.
5. Ismoyowati, Dyah, dkk. Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Ter-PHK Untuk Mengatasi Dampak Krisis, Dinamika Pedesaan dan Kawasan, Vol 2/02/2002
6. Rustiani, F., 1996, "Istilah-Istilah Umum dalam Wacana Gender", dalam Jurnal Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan, Edisi 4/November 1996, Yayasan Akatiga, Bandung.
7. Tjiptoherijanto, Prijono. Migrasi, urbanisasi, dan pasar kerja di Indonesia Jakarta : Penerbit

Universitas Indonesia, 1997

8. El-Saadawi, Nawal Wajah Telanjang Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press. 2003.
9. Sudarta, I Wayan. 2000. Peranan Pria dan Perempuan dalam Urusan Rumah Tangga. (Studi Kasus Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung). Jurnal Dinamika Kependudukan vol. II. no 1. th. 2000. Lembaga Penelitian UNUD. Denpasar. Online: <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/mjlhsrikandiria.pdf>
10. Thalib, Muhammad. Manajemen Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pro U. 2007.
11. Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-quran. Jakarta: Paramadina. 2001.